

**GAMBARAN PERSEPSI DOKTER GIGI PRAKTIK PUSKESMAS  
TENTANG BESARAN KAPITASI DALAM PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL (JKN) BERDASARKAN ASPEK BEBAN KERJA,  
LAMA WAKTU PELAYANAN, PENDAPATAN, DAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DI KOTA YOGYAKARTA**

Deny Tri Akbar<sup>1</sup>, Pipiet Okti Kusumastiwi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Dokter Gigi

**ABSTRACT**

**Background :** *Primary health center is one of primary health care that works together with The Indonesian National healthcare security called BPJS Kesehatan that provides comprehensive health service in Indonesian national health insurance system (JKN). There are obstacles that happen in the run of JKN. One of them is about capitation fund. According to ministry of health regulation No. 69 2013, the capitation fund set to puskesmas is Rp. 3.000-Rp 6.000,-. There are health providers who think that the capitation fund is still not enough. The aim of this study is to overview perception of dentists about capitation fund from different aspects, such as: workload, duration of service time, wage, and minimum service standard in Indonesian national health insurance (JKN) at primary health center in the Yogyakarta city.*

**Methods :** *Research method was observational descriptive study with the cross-sectional approach. The research subjects were 35 dentists who work at primary health center in Yogyakarta city. Sampling technique used in this research was total sampling technique. Instrument used in this research was questionnaire of perception. The data were analysed using descriptive statistic method.*

**Result :** *The result showed that based on workload aspect, 84% of dentists disagreed with the capitation fund, based on duration of service time, 69% of dentists agreed with the capitation fund, based on wage, 76% of dentists agreed with the capitation fund, and based on minimum service standard, 66% of dentist agreed with the capitation fund.*

**Conclusion :** *It can be concluded that based on workload aspect, most of dentists disagreed with capitation fund set to puskesmas Rp. 3.000-Rp. 6.000,-*

**Key words:** *perception, capitation fund, dentist*

## INTISARI

**Latar Belakang :** Puskesmas adalah salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memberikan pelayanan yang komprehensif di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan JKN, salah satunya adalah besaran kapitasi. Berdasarkan Permenkes No. 39 Tahun 2013 ditetapkan besaran kapitasi untuk puskesmas adalah Rp. 3.000-Rp. 6.000,-. Beberapa tenaga kesehatan seperti dokter gigi menganggap besaran kapitasi yang ditetapkan masih kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi dokter gigi praktik puskesmas tentang besaran kapitasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan aspek beban kerja, lama waktu pelayanan, pendapatan dan standar pelayanan minimal di Kota Yogyakarta.

**Metodes :** Penelitian jenis ini merupakan jenis penelitian observasional deskriptif dengan desain cross-sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh dokter gigi yang berjumlah 35 orang yang bekerja di puskesmas Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner persepsi. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.

**Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan aspek beban kerja, 84% dokter gigi setuju dengan besaran kapitasi yang ditetapkan. Berdasarkan aspek lama waktu pelayanan, sebesar 69% dokter gigi tidak setuju dengan besaran kapitasi yang ditetapkan. Berdasarkan aspek pendapatan, 76% dokter gigi tidak setuju dengan besaran kapitasi yang ditetapkan, dan berdasarkan aspek standar pelayanan minimal, sebesar 66% dokter gigi setuju dengan besaran kapitasi yang ditetapkan.

**Kesimpulan :** Persepsi dokter gigi praktik puskesmas tentang besaran kapitasi dalam program JKN di Kota Yogyakarta, berdasarkan aspek beban kerja memiliki nilai tertinggi yaitu dokter gigi tidak setuju dengan besaran kapitasi yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** persepsi, besaran kapitasi, dokter gigi

## Pendahuluan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sebuah sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia. Jaminan Sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia untuk menjamin warga negaranya agar memenuhi

kebutuhan hidup dasar yang layak<sup>1</sup>. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diselenggarakan sejak 1 Januari 2014 ini memiliki manfaat perlindungan kesehatan melalui pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

termasuk pelayanan obat dan bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diberikan<sup>2</sup>.

Pelayanan jaminan kesehatan dapat terlaksana secara nasional dengan dilakukannya perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan<sup>3</sup>.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berupa kapitasi dan non kapitasi. Pembayaran kapitasi dilakukan per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP seperti puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibayarkan langsung kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Besaran alokasi pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan seleksi dan kredensial dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. tarif kapitasi yang dimaksud untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut berupa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, dengan standar tarif kapitasi

di puskesmas sebesar Rp. 3.000,- s/d Rp. 6.000,-<sup>4</sup>.

Pelaksanaan JKN yang sudah berjalan selama 1,5 tahun tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan adalah permasalahan mengenai besaran kapitasi<sup>5</sup>. Tarif kapitasi pada puskesmas yang sebesar Rp. 6.000,- dinilai masih terlalu rendah. Biaya tersebut memang tidak begitu memberatkan bagi peserta JKN, namun bagi fasilitasi pelayanan kesehatan, biaya tersebut dinilai masih terlalu kecil dan belum dapat menutup biaya pelayanan kesehatan<sup>6</sup>. *Provider* menjadi tidak cukup termotivasi untuk implementasi jaminan kesehatan karena pemerintah dianggap belum memberikan kompensasi yang sesuai dengan beban kerja yang ditanggung<sup>7</sup>. Besaran kapitasi yang terlalu rendah untuk provider dapat menurunkan motivasi untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap peserta jaminan kesehatan<sup>8</sup>.

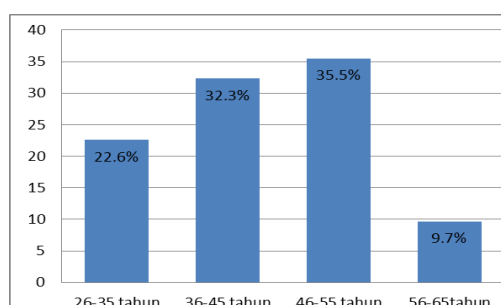
Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah perkotaan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis memiliki daratan dengan permukaan datar dibandingkan di daerah sekitarnya. Ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta tinggi. Hal ini terbukti Kota Yogyakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2014. Tingkat kepadatan yang tinggi menimbulkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin tinggi<sup>9</sup>.

## Metode

Jenis penelitian adalah observasional deskriptif dengan desain penelitian *cross-sectional*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dokter gigi praktik puskesmas di 18 unit puskesmas di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel adalah *total sampling* yaitu melibatkan seluruh anggota populasi. Jumlah subjek penelitian sebanyak 35 dokter gigi dengan 31 orang yang menjadi responden dan 4 dieklusikan karena tidak termasuk dokter gigi fungsional yang menjadi kriteria inklusi pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di puskesmas Kota Yogyakarta pada bulan Mei 2018. Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi dokter gigi tentang besaran kapitasi dalam program JKN.

Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner persepsi yang berisi 10 butir pernyataan meliputi aspek beban kerja, lama waktu pelayanan, pendapatan, dan standar pelayanan minimal. Penilaian kuesioner ini menggunakan skala *likert*.

## Hasil



Karakteristik usia responden paling banyak adalah 46-55 tahun sebanyak 35,5%, kemudian diikuti oleh kelompok usia 36-45 tahun sebanyak 32,3% responden, kelompok usia 26-35 tahun sebanyak 22,6% responden dan kelompok usia yang paling sedikit adalah 56-65 tahun sebanyak 9,7% responden.

Distribusi frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek beban kerja menunjukkan bahwa sebanyak 90,3% responden menyatakan tidak setuju jika besaran kapitasi Rp. 3000-6000,- sebanding dengan banyaknya pasien BPJS Kesehatan tiap harinya. sebanyak 78% responden menyatakan tidak setuju jika tarif kapitasi yang ditetapkan sebanding dengan rata-rata pasien yang dilayani tiap harinya.

Hasil Distribusi frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek lama waktu pelayanan menunjukkan bahwa sebesar 77,5% responden menyatakan setuju jika tarif kapitasi yang ditetapkan belum dapat memaksimalkan waktu pelayanan puskesmas yang diberikan. Sebesar 64,5% menyatakan setuju jika jam pelayanan yang diberikan di puskesmas sudah sesuai dengan tarif kapitasi yang ditetapkan dan sebesar

67,9% responden menyatakan setuju jika waktu pelayanan yang terlalu dapat merugikan.

Hasil Distribusi frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek pendapatan menunjukkan bahwa sebanyak 83,9% responden menyatakan tidak setuju jika tarif kapitasi sudah memberikan jaminan pendapatan tetap untuk dokter gigi. Sebanyak 87,1% responden menyatakan tidak setuju jika pendapatan dari kapitasi yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum dan sebesar 58% responden menyatakan tidak setuju jika pendapatan dari kapitasi mempengaruhi pendapatan pribadi secara signifikan.

Hasil Distribusi frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek standar pelayanan minimal menunjukkan bahwa Sebesar 74,2% responden menyatakan setuju jika Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter gigi untuk memberikan pelayanan BPJS tidak memberatkan. Sebanyak 58% responden menyatakan setuju jika penetapan PPK bagi dokter gigi sudah mencakup kebutuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

## **Pembahasan**

Berdasarkan aspek beban kerja, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi tidak setuju jika besaran kapitasi sebesar Rp. 3000-

6000,- sebanding dengan banyaknya pasien dan rata-rata pasien BPJS yang dilayani tiap harinya. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat pertama semenjak diberlakukannya JKN. Beberapa tenaga medis mengeluhkan terdapat peningkatan jumlah pasien semenjak era JKN sehingga beban kerja tenaga medis juga akan meningkat<sup>10</sup>. Beban kerja yang tinggi dapat meningkatkan timbulnya kesalahan dari tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting<sup>11</sup>.

Berdasarkan aspek lama waktu pelayanan, hasil menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi setuju jika jam pelayanan yang diberikan di puskesmas sudah sesuai dengan tarif kapitasi yang ditetapkan. Persepsi dokter gigi puskesmas mengenai perbandingan gaji kapitasi yang diterima dengan jumlah kerja yang diwajibkan sudah merasa cukup baik karena sistem JKN tidak mempengaruhi jumlah jam kerja dokter gigi di puskesmas<sup>12</sup>.

Peneliti berpendapat bahwa masih banyak responden menyatakan tarif kapitasi yang ditetapkan belum dapat memaksimalkan waktu pelayanan puskesmas yang diberikan disebabkan oleh sebagian besar pelayanan gigi adalah tindakan yang mengurus tenaga, stamina, kesehatan fisik dan waktu. Tindakan seperti penambalan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk

menghasilkan kualitas tambalan yang sesuai standar. Ketelitian, perhitungan yang akurat, seni, pengetahuan, dan waktu yang cukup adalah hal yang diperlukan dalam setiap tindakan pelayanan gigi.

Berdasarkan aspek pendapatan, hasil menunjukkan sebagian besar responden menyatakan tarif kapitasi tidak memberikan jaminan pendapatan tetap untuk dokter gigi. Ini disebabkan karena dana kapitasi tidak diatur dan dikelola secara langsung oleh dokter gigi yang bekerja di puskesmas sebagai dokter gigi fungsional. Hal tersebut berbeda dengan dokter gigi praktik yang bekerja sama dengan BPJS mengatur secara langsung dana kapitasi yang diberikan. Besaran kapitasi untuk dokter gigi praktik adalah sebesar Rp.2.000,- per orang per bulan sedangkan besaran kapitasi yang memiliki dokter gigi adalah sebesar Rp.6.000,- per orang per bulan<sup>13</sup>. pemanfaatan dana kapitasi JKN seluruhnya dialokasikan untuk jasa pelayanan dan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi dan selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan diperuntukkan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan<sup>14</sup>. Pendapatan dari kapitasi mempengaruhi pendapat pribadi secara signifikan. Dokter gigi fungsional yang bekerja di puskesmas menganggap pendapatan dari kapitasi tidak mempengaruhi

pendapat pribadi secara signifikan karena dokter gigi di puskesmas tidak menerima secara langsung dana kapitasi sebagai pendapatan. Dokter gigi yang bekerja di puskesmas adalah tenaga kerja kontrak/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima pendapatan tetap per bulan dari Pemerintah tetapi tidak menerima pendapatan tetap dari dana kapitasi.

Besaran kapitasi yang ada tidak mencukupi kebutuhan pokok minimum dokter gigi dan diperlukan adanya peningkatan besaran kapitasi. Besaran kapitasi untuk puskesmas ditetapkan dalam Permenkes Nomor 59 tahun 2014 bahwa tarif kapitasi untuk puskesmas yang memiliki dokter gigi yaitu sebesar Rp.6.000,-, tarif tersebut dinilai masih kurang oleh sebagian besar dokter gigi dan masih terjadi pro dan kontra. Pendapatan dari kapitasi yang cukup dapat mengoptimalkan pelayanan yang akan diberikan oleh *provider* dan akan semakin mendorong dokter gigi untuk berpartisipasi dalam program JKN.

Berdasarkan aspek standar pelayanan minimal, hasil menunjukkan sebagian besar responden menyatakan jika penetapan Panduan Praktik Klinis (PPK) tidak memberatkan dokter gigi. Responden menganggap penetapan PPK bagi dokter gigi tidak memberatkan dan sudah mencakup kebutuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian pada pernyataan berikut bahwa sebesar 58% responden menyatakan setuju jika penetapan PPK bagi dokter gigi sudah mencakup kebutuhan gigi dan mulut masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara tarif kapitasi yang diharapkan dokter gigi dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gibson (2000)

### Kesimpulan

Persepsi dokter gigi praktik puskesmas tentang besaran kapitasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Yogyakarta antara lain sebesar 84% dokter gigi mempersepsikan besaran kapitasi tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung, sebesar 69% dokter gigi mempersepsikan besaran kapitasi sebanding dengan lama waktu pelayanan yang diberikan, berdasarkan aspek pendapatan sebesar 76% dokter gigi mempersepsikan besaran kapitasi belum cukup mencukupi sebagai pendapatan dokter gigi, dan sebesar 66% dokter gigi mempersepsikan besaran kapitasi yang ditetapkan sebanding dengan standar pelayanan minimal yang ada.

### Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Siregar, T. (2015). BPJS Watch: Pelaksanaan JKN Banyak Masalah. *Republika*. Diakses 27 Juli 2018, dari <http://republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/06/24/nqfssa4-bpjs-watch-pelaksanaan-jkn-banyak-masalah>
6. Anisa, S.R. (2014). Kapitasi JKN Dinilai Terlalu Rendah. *Beritasatu.com*. Diakses 27 Juli, dari <http://www.beritasatu.com/kesra/160862-kapitasi-jkn-dinilai-terlalu-rendah.html>
7. Dalinjong, P.A., Laar, A.S. (2012). The national health insurance scheme: perceptions and experiences of health care providers and clients in two districts of Ghana. *Health Economics Review*. 1-13
8. Robyn, P.J., Barnighausen, T., Soares, A., Savadogo, G., Bicaba, B., Sie, A., Sauerborn, R., dkk. (2013). Does enrollment status in community-based insurance lead to poorer quality of care? Evidence from Burkina Faso. *International Journal for Equity in Health*. 1-13
9. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2015). *Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2014*. Yogyakarta: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
10. Despitari, M. (2014). Memangnya Hanya Peserta BPJS yang Harus Puas? Tenaga Kesehatan Juga Harus Puas.

*Kompasiana*. Diakses 27 Juli 2018, dari <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/10/28/memangnya-cuma-peserta-bpjs-yang-harus-puas-tenaga-kesehatan-juga-harus-puas-698953.html>

11. Hurlock, E.B. (1998). *Perkembangan Anak Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
12. Ramdani, A.H., Setiawati, E. P., Herawati, D.M.D (2016). *Persepsi Dokter Puskesmas di Kota Bandung terhadap Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*. Bandung: *JSK*. Vol.1.No.4:171-178
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah.
15. Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnely, J.H. (2000). *Organisasi: Perlaku-Struktur-Proses Jilid 1 Edisi 5*. Jakarta.